

**STATUS KELEMBAGAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS
BIDANG PERIKANAN DI NEGERI HUKURILA
KECAMATAN LEITIMUR SELATAN
KOTA AMBON**

***INSTITUTIONAL STATUS OF THE FISHERIES SUPERVISORY COMMUNITY GROUP
IN HUKURILA VILLAGE SOUTH LEITIMUR DISTRICT, AMBON***

Eygner Gerald Talakua^{1*}, Yoisy Lopez Lopulalan¹, Geral Ignatius Likipiouw¹

¹Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura

*Penulis korespondensi: eygnertalakua@gmail.com

Diterima 27 Oktober 2024, disetujui 2 Desember 2024

ABSTRAK

Salah satu kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan di Kota Ambon adalah Kelompok Masyarakat Pengawas "Tihulesy" di Negeri Hukurila Kecamatan Leitimur Selatan. Kelompok masyarakat pengawas telah menjalankan tugas/kewajiban selama 2 tahun, namun terdapat kendala utama yakni belum tersedia sarana dan prasarana pengawasan yang memadai sehingga kegiatan pengawasan terbatas pada kawasan laut dan pesisir terdekat. Untuk itu evaluasi terhadap tingkat perkembangan kelembagaan kelompok masyarakat pengawas perlu dilakukan, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat perkembangan dan menentukan prioritas pengembangan kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila. Data primer yang diperoleh melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner terhadap 10 responden selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan *institutional development framework*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kelembagaan adalah rendah atau tidak memiliki sumber daya kelembagaan yang cukup untuk menjamin kelangsungannya. Prioritas pengembangan kelembagaan terbagi atas: 1). Skala prioritas jangka pendek adalah peningkatan kualitas dan kuantitas peran, yakni tugas pengawasan sumber daya perikanan; 2). Skala prioritas jangka menengah adalah pengembangan organisasi, peningkatan kepemimpinan, peningkatan sistem manajemen, membangun hubungan/komunikasi/dan koordinasi, pengelolaan anggaran, serta pengadaan fasilitas dan alat penunjang kerja; dan 3). Skala prioritas jangka panjang adalah peningkatan keterampilan dan pengembangan anggota, serta pengembangan produk atau nilai ekonomi sumber daya perikanan di Negeri Hukurila.

Kata kunci: lembaga, kelompok, masyarakat, pengawas, perikanan.

ABSTRACT

One of the Fisheries Supervisory Community Groups in Ambon City is the "Tihulesy" Community Supervisory Group in Hukurila Village, South Leitimur District. The fisheries supervisory community group has carried out its duties/obligations for 2 years, but there is a main obstacle, namely that there are no adequate monitoring facilities and infrastructure so that monitoring activities are limited to the nearest sea and coastal areas. For this reason, an evaluation of the level of institutional development of fisheries supervisory community groups needs to be carried out, so this research aims to analyze the level of development and determine priorities for institutional development of fisheries supervisory community groups in Hukurila State. Primary data obtained through structured interviews using a questionnaire with 10 respondents was then analyzed qualitatively using an institutional development framework approach. The research results show that the institutional status is low or does not have sufficient institutional resources to ensure its continuity. Institutional development priorities are divided into: 1). The short-term priority scale is increasing the quality and quantity of roles, namely the task of monitoring fisheries resources; 2). The medium-term priority scale is organizational development, improving leadership, improving management systems, building relationships/communication/and coordination, budget management, and procurement of work support facilities and tools; and 3). The long-term priority scale is increasing skills and developing members, as well as developing products or the economic value of fisheries resources in Hukurila Village.

Keywords: institutions, groups, communities, supervisors, fisheries.



Cara sitasi: Talakua, E. G., Lopulalan, Y., & Likipiouw, G. I. 2024. Status Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas Bidang Perikanan di Negeri Hukurila Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, 8(2), 129-143, DOI: <https://doi.org/10.30598/papalele.2024.8.2.129/>

PENDAHULUAN

Laut Indonesia mempunyai ragam kekayaan yang melimpah. Kekayaan yang terkandung di laut dapat dibedakan menjadi kekayaan yang berasal dari sumber daya kelautan dan sumber daya perikanan. Sumber daya kelautan berupa terumbu karang dan pasir laut, sementara sumber daya perikanan berupa perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. Pembagian wilayah Maluku secara administratif terdiri dari sembilan kabupaten dan dua kota yang masing-masing memiliki karakteristik dan potensi perikanan yang berbeda. Letak geografis Maluku yang berada pusat sabuk segitiga emas terumbu karang dunia sehingga mengakibatkan Maluku kaya akan sumberdaya ikan dengan panjang garis pantai 10.630,1 km 13 % dari total panjang garis pantai di Indonesia (DKP Provinsi Maluku, 2021).

Laut Maluku dengan segala sumber dayanya memiliki potensi besar dalam konteks ketahanan pangan yang bersumber dari laut. Potensi perikanannya mencapai 4,6 juta ton dari total potensi sumber daya ikan nasional sebesar 12,5 juta ton. Dengan kata lain, potensi perikanan laut Maluku tersebut menguasai 37,23 % dari potensi sumber daya ikan nasional (Ariansyah, 2021). Potensi besar tersebut perlu perhatian seluruh pihak dalam pemanfaatannya.

Kegiatan pembangunan di wilayah daratan juga menyisakan berbagai macam permasalahan seperti pencemaran, gejala penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*), penangkapan ikan dengan bahan peledak/racun/setrum, penambangan terumbu karang yang digunakan sebagai bahan bangunan, degradasi fisik habitat pesisir, serta konflik pemanfaatan ruang. Berbagai permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi dan ditanggulangi akan berakibat buruk bagi kelangsungan sumber daya perikanan. Pengawasan merupakan salah satu cara untuk memutus berbagai praktek penyalahgunaan pemanfaatan wilayah laut yang tidak bertanggung jawab. Tanpa adanya pengawasan dan pemantauan di lapangan maka praktek

penyalahgunaan pemanfaatan wilayah laut akan semakin liar dan buas (Wiseli, 2020).

Masyarakat pesisir dapat meningkatkan hasil tangkapannya dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimum, jika sumber daya tersebut dapat dijaga dari tindakan pencurian dan perusakan. Terbatasnya jumlah pengawas perikanan dengan meluasnya kewenangan pengawasan, banyaknya jumlah nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat perikanan yang setiap saat ada di lapangan dan melakukan usaha perikanan maka salah satu strategi Pemerintah untuk mengelola sumberdaya perairan adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.58/MEN/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan. Peraturan-peraturan tersebut merupakan payung hukum bentuk pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk membentuk Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya.

Pokmaswas adalah kelompok masyarakat pengawas yang merupakan salah satu bentuk pengawasan yang melibatkan masyarakat. Pokmaswas merupakan pelaksana pengawas ditingkat lapangan yang didalamnya terdiri dari unsur masyarakat, dimana kelompok tersebut dibentuk atas inisiatif masyarakat yang sadar akan pentingnya kelestarian sumber daya perikanan yang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dengan menggunakan prinsip 3M yaitu melihat, mencatat, dan melaporkan (Nuari *et al.*, 2022).

Pokmaswas yang terbentuk di Negeri Hukurila dikukuhkan pembentukannya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Pengawasan oleh Pokmaswas di tingkat lapangan dapat dilaksanakan dengan baik, tapi hal ini



terkendala karena belum tersedia sarana dan prasarana pengawasan yang memadai. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh kelompok masih terbatas hanya pada lokasi perairan dimana kelompok Pokmaswas berada. Sebelumnya secara teori, Ratnawati (2010), telah mengidentifikasi secara umum permasalahan yang terjadi di Pokmaswas yaitu wawasan, motivasi, dan tingkat pendidikan anggota, pengaturan dan tata laksana institusional, pembiayaan, sarana dan prasarana, dan peran pemerintah. Dengan demikian Pokmaswas yang telah ada di Negeri Hukurila perlu dikembangkan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah sehingga tugas pokok dan fungsi kelompok dapat berjalan optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perkembangan dan menentukan prioritas pengembangan kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila.

METODOLOGI

Metode dasar penelitian adalah studi kasus. Menurut Surjarweni (2015) penelitian studi kasus adalah penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam, tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Negeri Hukurila Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon Provinsi Maluku. Waktu pelaksanaan penelitian adalah bulan Juli hingga bulan September tahun 2024.

Jenis dan Metode Pengambilan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan observasi langsung (Sugiyono, 2017). Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuisioner dengan responden (anggota Pokmaswas). Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017). Data sekunder diperoleh dari referensi, publikasi ilmiah dan instansi terkait yang mendukung penelitian ini.

Metode Pengambilan Sampel

Populasi penelitian adalah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Tiulesy Negeri Hukurila Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon berjumlah 10 orang. Penarikan sampel dengan metode *exhausting sampling* sehingga diperoleh 10 orang sebagai sampel penelitian atau responden.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), teknik analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, pemilihan kepentingan dan membuat kesimpulan.

Analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan pengembangan institusi adalah analisis *institutional development framework* (IDF) atau sering juga disebut dengan kerangka pengembangan kelembagaan yang adopsi dari Manullang (1999). Tahapan pertama analisis IDF adalah menyusun matriks IDF. Matriks IDF pada Lampiran 2. menunjukkan bahwa terdapat 8 sumber daya kelembagaan yang terurai dalam 11 karakteristik organisasi, keseluruhan karakteristik organisasi diuraikan lagi menjadi 40 komponen kunci organisasi. Komponen kunci organisasi inilah yang diberikan bobot dan tingkat perkembangan, yakni:

1. Bobot

Bobot diartikan sebagai tingkat kepentingan atau prioritas dari komponen kunci. Nilai bobot berkisar dari 1 sampai 4. Setiap komponen kunci diberikan bobot dengan ketentuan dijabarkan pada Tabel 1. Nilai bobot adalah nilai normatif dari komponen kunci. Nilai normatif adalah bagaimana seharusnya arti atau makna



komponen kunci itu bagi organisasi, sehingga yang dicantumkan adalah nilai ideal.

Tabel 1. Bobot Komponen Kunci

Tingkat Kepentingan	Prioritas	Nilai Bobot
Sangat penting	Menentukan hidup mati organisasi; sangat vital	4
Penting	Memerlukan perhatian khusus; tidak dapat diabaikan	3
Cukup penting	Tidak menjadi prioritas	2
Tidak penting	Mungkin menjadi penting dalam jangka panjang	1

2. Tingkat Perkembangan Kelembagaan
Tingkat perkembangan kelembagaan dinilai secara kuantitatif pada rentang nilai dari 0,25 sampai 4,0, yang mencakup empat tingkat perkembangan yaitu awal, perkembangan, pematangan, dan dewasa. Suatu lembaga dinilai “dewasa” apabila ia memiliki sumber daya sumber daya kelembagaan yang menjamin kelangsungan hidupnya. Setiap tingkat perkembangan dibagi empat sehingga gradasi antara setiap tingkat perkembangan dapat diperhalus. Ketentuan penilaian tingkat perkembangan kelembagaan dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Penilaian Tingkat Perkembangan Kelembagaan

Tingkat Perkembangan Kepentingan	Tahap Perkembangan	Nilai
Awal	Permulaan suatu organisasi	0,25; 0,50; 0,75; atau 1,00
Berkembang	Pertumbuhan organisasi	1,25; 1,50; 1,75; atau 2,00
Pematangan	Perluasan dan konsolidasi	2,25; 2,50; 2,75; atau 3,00
Dewasa	Organisasi sudah stabil dan berkelanjutan	3,25; 3,50; 3,75; atau 4,00

Dalam penilaian tingkat perkembangan, setiap komponen kunci diteliti mengenai kinerja atau keadaan objektifnya. Dengan kata lain yang dinilai adalah sampai sejauh mana kinerja atau pencapaian yang telah diraih oleh lembaga ini dalam melaksanakan atau menjalankan komponen kunci yang bersangkutan.

3. Indeks IDF
Skor di kolom paling kanan diisi dengan cara mengalikan nilai bobot (X) dengan nilai tingkat perkembangan organisasi (Y). Nilai skor (XY) bagi setiap komponen kunci akan berkisar dari 0,25 sampai 16. Setelah semua komponen kunci dihitung skornya, dilakukan penjumlahan skor dari seluruh komponen kunci (Z). Nilai Bobot (X) dari seluruh komponen kunci dijumlahkan ke bawah sehingga didapat nilai B. Selanjutnya, nilai indeks IDF (I) dihitung dengan membagi nilai Z dengan B. Nilai indeks ini mempunyai nilai maksimum sebesar 4,0. Kriteria nilai indeks IDF (I) adalah;
- Nilai I sebesar 1,0 atau kurang, menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki sumber daya kelembagaan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Lembaga seperti ini perlu mempertimbangkan kembali tujuan keberadaannya.
 - Nilai I yang menengah adalah 2,0, berarti lembaga yang sudah mempunyai basis yang cukup kuat untuk berkembang, namun demikian masih sangat perlu meningkatkan kinerja untuk mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi.
 - Nilai I sebesar 3,0 atau lebih menunjukkan bahwa lembaga tersebut sudah memiliki kapasitas yang cukup baik untuk mempertahankan eksistensinya untuk menuju kepada kemandirian dan kelanggengan.



4. Grafik Sasaran Prioritas

Grafik sasaran prioritas adalah suatu gambaran grafis dari nilai-nilai bobot dan tingkat perkembangan organisasi di atas sumbu XY yang dapat menggambarkan prioritas pengelolaan yang harus diterapkan oleh organisasi untuk masa yang akan datang. Nilai-nilai yang terdapat dalam matriks IDF diplotkan ke sumbu XY sebagai koordinat dari titik-titik yang menunjukkan komponen-komponen kunci. Nilai bobot atau prioritas digambarkan sebagai nilai X dan nilai tingkat perkembangan adalah nilai Y. Penyebaran titik-titik pada sumbu XY mempunyai makna sebagai berikut:

- a. Titik-titik yang terletak dalam kuadran I menunjukkan komponen-komponen kunci yang memiliki prioritas atau bobot kepentingan tinggi dan kinerja organisasi untuk komponen kunci tersebut berada pada tingkat perkembangan yang tinggi;
- b. Titik-titik yang terletak dalam kuadran II menunjukkan komponen-komponen kunci yang memiliki prioritas atau bobot kepentingan tinggi tetapi kinerja organisasi untuk komponen kunci tersebut berada pada tingkat perkembangan yang rendah;
- c. Titik-titik yang terletak dalam kuadran III menunjukkan komponen-komponen kunci yang memiliki prioritas atau bobot kepentingan rendah dan kinerja organisasi untuk komponen kunci tersebut berada pada tingkat perkembangan yang rendah;
- d. Titik-titik yang terletak dalam kuadran IV menunjukkan komponen-komponen kunci yang memiliki prioritas atau bobot kepentingan tinggi dan kinerja organisasi untuk komponen kunci tersebut berada pada tingkat perkembangan yang rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian Kerangka Pengembangan Kelembagaan

Penilaian kerangka pengembangan kelembagaan terdiri atas penilaian kepentingan atau prioritas komponen kunci (bobot atau X)

dan penilaian tingkat perkembangan kelembagaan komponen kunci (Y). Penilaian kerangka pengembangan kelembagaan diuraikan berdasarkan sumber daya kelembagaan, karakteristik organisasi, dan komponen kunci kelembagaan sebagai berikut:

- a. Sumber daya kelembagaan: pengendalian (*oversight*)

Pengendalian (*oversight*) dalam kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila terdiri atas organisasi Pokmaswas sebagai karakteristik organisasi dan tiga (3) komponen kunci yakni: Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, visi dan misi organisasi. Hasil penelitian pada Tabel 3 menunjukkan bahwa, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku sebagai pengendali Pokmaswas sangat penting (menentukan hidup-mati organisasi/sangat vital) karena peran DKP Provinsi Maluku sebagai pemberi SK pembentukan Pokmaswas di Negeri Hukurila. Visi dan misi sebagai pengendali Pokmaswas di Negeri Hukurila dinilai penting (memerlukan perhatian khusus/tidak dapat diabaikan) karena visi adalah gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai di masa depan, sedangkan misi adalah pernyataan yang menggambarkan tindakan, strategi, dan pendekatan untuk mencapai visi Pokmaswas di Negeri Hukurila.

Tingkat perkembangan yang menunjukkan kinerja atau pencapaian komponen kunci kelembagaan yang telah dilakukan/diraih oleh Pokmaswas di Negeri Hukurila ada pada tingkat awal yaitu visi dan misi, sedangkan DKP Provinsi Maluku berada pada tingkat perkembangan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa visi dan misi Pokmaswas di Negeri Hukurila belum jelas, sedangkan dukungan DKP Provinsi Maluku terhadap Pokmaswas di Negeri Hukurila masih berlangsung walaupun masih dalam tahapan pertubuhan organisasi.

Skor tertinggi komponen kunci dalam organisasi Pokmaswas di Negeri Hukurila adalah peran DKP Provinsi Maluku. Hal ini menunjukkan bahwa DKP Provinsi Maluku berperan penting bagi Pokmaswas dalam menjalankan tugas pengawasan bidang



perikanan di Negeri Hukurila walaupun hubungannya masih bersifat *top-down* dan perlu pengembangan. Skor komponen kunci yang rendah yaitu visi dan misi mengartikan bahwa visi dan misi

Pokmaswas di Negeri Hukurila perlu dikembangkan melalui rumusan secara tertulis guna arah pelaksanaan tugas jangka panjang pengawasan bidang perikanan di Negeri Hukurila.

Tabel 3. Penilaian Pengendalian (*Oversight*)

Karakteristik Organisasi	Komponen Kunci	Penilaian		Skor
		Kepentingan/ Prioritas (Bobot)	Tingkat Perkembangan	
Organisasi Pokmaswas	a. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku	4	2,00	8,00
	b. Visi	3	0,25	0,75
	c. Misi	3	0,25	0,75

Sumber: data primer (2024).

b. Sumber daya kelembagaan: manajemen
 Manajemen dalam kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila terdiri atas kepemimpinan dan sistem manajemen sebagai karakteristik organisasi dan sepuluh (10) komponen kunci yakni: pengambilan keputusan, partisipasi, personalia, arah perencanaan, evaluasi perencanaan, partisipasi perencanaan, basis anggaran, laporan keuangan, pemeriksaan keuangan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa, komponen kunci manajemen yang sangat penting adalah pengambilan keputusan, personalia, dan evaluasi perencanaan. Komponen kunci yang penting adalah partisipasi, arah perencanaan, partisipasi perencanaan, basis anggaran, serta monitoring dan evaluasi, sedangkan komponen kunci yang cukup penting adalah laporan keuangan dan pemeriksaan keuangan.

Tingkat perkembangan yang menunjukkan kinerja atau pencapaian komponen kunci kelembagaan yang telah dilakukan/diraih oleh Pokmaswas di Negeri Hukurila ada pada tingkat awal yaitu pengambilan keputusan, evaluasi perencanaan, basis anggaran, laporan keuangan, pemeriksaan keuangan, serta monitoring dan evaluasi. Pada tingkat perkembangan yaitu partisipasi dalam kepemimpinan dan

perencanaan, kemudian pada tingkat dewasa adalah personalia.

Skor tertinggi komponen kunci dalam kepemimpinan dan sistem manajemen Pokmaswas di Negeri Hukurila adalah personalia dan arah perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa personalia dan arah perencanaan merupakan prioritas dengan perkembangan yang tinggi saat ini karena sistem dan rekrutmen personalia (anggota Pokmaswas di Negeri Hukurila) hanya sebagian kecil dipengaruhi oleh DKP Provinsi Maluku, serta arah perencanaan disesuaikan dengan kondisi di Negeri Hukurila dengan kerangka (aturan) dari DKP Provinsi Maluku.

Skor terendah komponen kunci dalam kepemimpinan dan sistem manajemen Pokmaswas di Negeri Hukurila adalah pengambilan keputusan, partisipasi dalam kepemimpinan, evaluasi perencanaan, partisipasi perencanaan, basis anggaran, laporan keuangan, pemeriksaan keuangan, serta monitoring dan evaluasi. Delapan (8) komponen kunci ini perlu dikembangkan melalui kemandirian dalam pengambilan keputusan, delegasi keputusan oleh pimpinan untuk dikerjakan, pelibatan anggota dalam perencanaan dan evaluasi perencanaan secara rutin, pengusulan anggaran prioritas, adanya laporan dan pemeriksaan keuangan, serta proses monitoring dan evaluasi manajemen periodik.



Tabel 4. Penilaian Manajemen

Karakteristik Organisasi	Komponen Kunci	Penilaian		Skor
		Kepentingan/ Prioritas (Bobot)	Tingkat Perkembangan	
Kepemimpinan	a. Pengambilan keputusan	4	1,00	4,00
	b. Partisipasi	3	2,00	6,00
Sistem manajemen	c. Personalia	4	3,25	13,00
	d. Arah perencanaan	3	3,00	9,00
	e. Evaluasi perencanaan	4	0,25	1,00
	f. Partisipasi Perencanaan	3	1,25	3,75
	g. Basis anggaran	3	0,25	0,75
	h. Laporan keuangan	2	0,25	0,50
	i. Pemeriksaan keuangan	2	0,25	0,50
	j. Monitoring dan evaluasi	3	0,25	0,75

Sumber: data primer (2024).

- c. Sumber daya kelembagaan: sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) dalam kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila terdiri atas keterampilan staf, pengembangan staf, dan asal usul staf sebagai karakteristik organisasi dan tujuh (7) komponen kunci yakni: struktur organisasi, tugas dan wewenang, pelatihan, evaluasi staf, penghargaan, lokal, dan suku asli. Hasil penelitian pada Tabel 5 menunjukkan bahwa, komponen kunci SDM yang sangat penting adalah struktur organisasi, kemudian komponen kunci yang penting adalah tugas dan wewenang, pelatihan, evaluasi staf, lokal, dan suku asli, sedangkan komponen kunci yang cukup penting adalah penghargaan.

Tingkat perkembangan yang menunjukkan kinerja atau pencapaian komponen kunci kelembagaan yang telah dilakukan/diraih oleh Pokmaswas di Negeri Hukurila ada pada tingkat awal yaitu pelatihan, pelatihan, evaluasi staf, dan penghargaan. Pada tingkat perkembangan adalah struktur organisasi serta tugas dan wewenang, sedangkan pada tingkat dewasa adalah asal usul staf lokal dan suku asli.

Skor tertinggi komponen kunci dalam keterampilan, pengembangan, dan asal usul staf pada Pokmaswas di Negeri Hukurila adalah staf dari lokal dan suku asli. Hal ini sesuai kenyataan bahwa seluruh staf atau anggota Pokmaswas di Negeri Hukurila merupakan penduduk asli Negeri Hukurila (*anak negeri*).

Tabel 5. Penilaian Sumber Daya Manusia

Karakteristik Organisasi	Komponen Kunci	Penilaian		Skor
		Kepentingan/ Prioritas (Bobot)	Tingkat Perkembangan	
Keterampilan staf	a. Struktur organisasi	4	2,00	8,00
	b. Tugas dan wewenang	3	2,00	6,00
Pengembangan staf	c. Pelatihan	3	0,25	0,75
	d. Evaluasi staf	3	0,25	0,75
	e. Penghargaan	2	0,25	0,50
Asal usul staf	f. Lokal	3	4,00	12,00
	g. Suku asli	3	4,00	12,00

Sumber: data primer (2024).



Skor terendah komponen kunci dalam keterampilan, pengembangan, dan asal usul staf pada Pokmaswas di Negeri Hukurila adalah struktur organisasi, tugas dan wewenang, pelatihan, evaluasi staf, serta penghargaan. Lima (5) komponen kunci ini perlu dikembangkan melalui penentuan posisi dalam organisasi secara mandiri, pelatihan oleh DKP Provinsi Maluku, pelaksanaan evaluasi staf, dan pengakuan atas prestasi kerja. Jika komponen kunci ini dikembangkan maka terjadi peningkatan kualitas SDM Pokmaswas dalam pengawasan sumber daya perikanan di Negeri Hukurila.

- d. Sumber daya kelembagaan: keuangan
 Keuangan dalam kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila terdiri atas anggaran sebagai karakteristik organisasi dan dua (2) komponen kunci yakni: pengelolaan anggaran dan sumber dana. Hasil penelitian pada Tabel 6

menunjukkan bahwa, komponen kunci keuangan yang penting adalah pengelolaan anggaran, dan komponen kunci yang cukup penting adalah sumber dana.

Tingkat perkembangan yang menunjukkan kinerja atau pencapaian komponen kunci kelembagaan yang telah dilakukan/diraih oleh Pokmaswas di Negeri Hukurila berada pada tingkat awal. Rendahnya tingkat perkembangan mengakibatkan rendahnya skor kedua komponen kunci pengelolaan anggaran dan sumber dana. Dengan demikian kedua komponen ini perlu dikembangkan, yakni merubah pemahaman bahwa anggaran tidak/kurang menentukan pengelolaan Pokmaswas, serta mengusulkan dana kegiatan kepada DKP Provinsi Maluku. Hal ini perlu dilakukan mengingat peningkatan kualitas kegiatan pengawasan memerlukan pembiayaan, salah satu contohnya adalah kegiatan pelaporan menggunakan alat/media informasi seperti *handphone* (HP).

Tabel 6. Penilaian Keuangan

Karakteristik Organisasi	Komponen Kunci	Penilaian		
		Kepentingan/ Prioritas (Bobot)	Tingkat Perkembangan	Skor
Anggaran	a. Pengelolaan anggaran	3	0,25	0,75
	b. Sumber dana	2	0,25	0,50

Sumber: data primer (2024).

- e. Sumber daya kelembagaan: sumber daya eksternal
 Sumber daya eksternal dalam kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila terdiri atas hubungan, komunikasi, & koordinasi sebagai karakteristik organisasi dan enam (6) komponen kunci yakni: pemerintah daerah, masyarakat sekitar, DKP Provinsi Maluku, LSM, universitas, dan swasta. Hasil penelitian pada Tabel 7 menunjukkan bahwa, komponen kunci sumber daya eksternal yang sangat penting adalah pemerintah daerah, masyarakat sekitar, dan DKP Provinsi Maluku, sedangkan komponen kunci yang cukup penting (tidak menjadi prioritas) adalah LSM, universitas, dan swasta.

Tingkat perkembangan yang menunjukkan kinerja atau pencapaian komponen kunci kelembagaan yang telah dilakukan/diraih oleh Pokmaswas di Negeri Hukurila ada pada tingkat awal yaitu LSM dan swasta. Pada tingkat perkembangan adalah pemerintah daerah, masyarakat sekitar, DKP Provinsi Maluku, dan universitas.

Skor tertinggi komponen kunci dalam hubungan, komunikasi, dan koordinasi pada Pokmaswas di Negeri Hukurila adalah pemerintah daerah, masyarakat sekitar, dan DKP Provinsi Maluku. Pokmaswas dalam menjalankan tugas berhubungan, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemerintah Negeri Hukurila) terkait masalah pengawasan, beriteraksi dengan masyarakat sekitar, serta



komunikasi kegiatan kerja dengan DKP Provinsi Maluku.
 Skor terendah komponen kunci dalam hubungan, komunikasi, dan koordinasi pada Pokmaswas di Negeri Hukurila adalah LSM, universitas, dan swasta. Tiga (3) komponen kunci ini perlu dikembangkan

melalui komunikasi dengan peneliti/swasta yang memanfaatkan sumber daya perikanan di Negeri Hukurila untuk penelitian maupun berusaha/berbisnis. Selain itu membangun pemahaman tentang keberadaan Pokmaswas di kalangan LSM juga penting dilakukan.

Tabel 7. Penilaian Sumber Daya Eksternal

Karakteristik Organisasi	Komponen Kunci	Penilaian		Skor
		Kepentingan/ Prioritas (Bobot)	Tingkat Perkembangan	
Hubungan, komunikasi, & koordinasi	a. Pemerintah Daerah	4	2,00	8,00
	b. Masyarakat desa sekitar	4	2,00	8,00
	c. DKP Provinsi Maluku (SD Eksternal)	4	2,00	8,00
	d. LSM	2	0,25	0,50
	e. Universitas	2	2,00	4,00
	f. Swasta	2	0,25	0,50

Sumber: data primer (2024).

f. Sumber daya kelembagaan: produk
 Produk dalam kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila terdiri atas nilai ekonomi ekosistem sebagai karakteristik organisasi dan empat (4) komponen kunci yakni: sumber daya perikanan, konservasi sumber daya perikanan, sumber bahan penelitian, dan pendapatan dari wisata. Hasil penelitian

pada Tabel 8 menunjukkan bahwa, seluruh komponen kunci nilai ekonomi ekosistem yakni sumber daya perikanan, konservasi sumber daya perikanan, sumber bahan penelitian, dan pendapatan dari wisata adalah penting (perlu mendapat perhatian khusus/tidak dapat diabaikan) dalam kelembagaan Pokmaswas.

Tabel 8. Penilaian Produk

Karakteristik Organisasi	Komponen Kunci	Penilaian		Skor
		Kepentingan/ Prioritas (Bobot)	Tingkat Perkembangan	
Nilai ekonomi sumber daya perikanan	a. Sumberdaya perikanan	3	3,00	9,00
	b. Konservasi sumberdaya perikanan	3	3,00	9,00
	c. Sumber bahan penelitian	3	1,25	3,75
	d. Pendapatan dari wisata	3	3,00	9,00

Sumber: data primer (2024).

Tingkat perkembangan yang menunjukkan kinerja atau pencapaian komponen kunci kelembagaan yang telah dilakukan/diraih oleh Pokmaswas di Negeri Hukurila ada pada tingkat awal yaitu sumber bahan penelitian. Pada tingkat pematapan adalah sumber daya perikanan, konservasi sumber daya perikanan, pendapatan dari wisata. Tingkat perkembangan menentukan skor

komponen kunci (karena seluruh komponen kunci bernilai bobot sama) dalam produk kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila, dimana skor terendah yakni sumber bahan penelitian perlu dikembangkan karena hanya sedikit riset/penelitian yang dilakukan. Peningkatan riset/penelitian tentang produk kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri



Hukurila akan meningkatkan kualitas manajemen/pengelolaan.

- g. Sumber daya kelembagaan: pelaksanaan peran
Pelaksanaan peran dalam kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila ditampilkan sesuai lima (5) peran Pokmaswas dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan (USAID, 2020). Pelaksanaan peran dalam kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila terdiri atas tugas pengawasan sumber daya perikanan sebagai karakteristik organisasi dan lima (5)

komponen kunci yakni: membantu pemerintah dalam pengawasan kawasan konservasi, melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan, membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan, melaporkan tindakan perusakan lingkungan di wilayah pesisir, dan mengisi *logbook* atau buku harian. Hasil penelitian pada Tabel 9 menunjukkan bahwa, seluruh komponen kunci tugas pengawasan sumber daya perikanan adalah sangat penting (menentukan hidup-mati organisasi/sangat vital) dalam lembaga Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila.

Tabel 9. Penilaian Pelaksanaan Peran

Karakteristik Organisasi	Komponen Kunci	Penilaian		Skor
		Kepentingan/ Prioritas (Bobot)	Tingkat Perkembangan	
Tugas pengawasan sumber daya perikanan	a. Membantu pemerintah dalam pengawasan kawasan konservasi	4	2,00	8,00
	b. Melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan	4	2,00	8,00
	c. Membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan	4	1,00	4,00
	d. Melaporkan tindakan perusakan lingkungan di wilayah pesisir	4	2,00	8,00
	e. Mengisi <i>logbook</i> atau buku harian	4	0,25	1,00

Sumber: data primer (2024).

Tingkat perkembangan yang menunjukkan kinerja atau pencapaian komponen kunci kelembagaan yang telah dilakukan/diraih oleh Pokmaswas di Negeri Hukurila ada pada tingkat awal yaitu membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan dan mengisi *logbook* atau buku harian. Pada tingkat perkembangan adalah membantu pemerintah dalam pengawasan kawasan konservasi, melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan, dan melaporkan tindakan perusakan lingkungan di wilayah pesisir. Tiga komponen kunci pada tingkat perkembangan memiliki skor komponen kunci tertinggi menunjukkan bahwa Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila telah menjalankan sebagian tugas dengan baik, yakni: melakukan pengawasan kawasan konservasi hanya pada

waktu/bersamaan dengan aktivitas penangkapan ikan, menegur secara langsung tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan, dan menegur secara langsung tindakan perusakan lingkungan di wilayah pesisir. Pelaksanaan tugas pengawasan ini perlu ditingkatkan kualitasnya hingga pada tahap pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, skor komponen kunci dalam pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya perikanan yang rendah yakni membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan dan mengisi *logbook* atau buku harian perlu dikembangkan oleh Pokmaswas melalui sosialisasi aturan pengelolaan bersamaan dengan tindakan pelanggaran, dan mulai mengisi *logbook* atau membuat catatan tiap bulan/tahun.



h. Sumber daya kelembagaan: sarana dan prasarana
 Sarana dan prasarana dalam kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila terdiri atas fasilitas atau alat penunjang kerja sebagai karakteristik organisasi dan tiga (3) komponen kunci yakni: ruang, sarana, dan peralatan kerja. Hasil penelitian pada Tabel 13 menunjukkan bahwa, seluruh komponen kunci fasilitas atau alat penunjang kerja yakni ruang, sarana, dan peralatan kerja adalah penting (perlu mendapat perhatian khusus/tidak dapat diabaikan) dalam kelambagaan Pokmaswas.
 Tingkat perkembangan yang menunjukkan kinerja atau pencapaian komponen kunci

kelembagaan yang telah dilakukan/diraih oleh Pokmaswas di Negeri Hukurila ada pada tingkat awal yaitu ruang, sarana, dan peralatan kerja. Hal ini sesuai kenyataan bahwa Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila belum memiliki ruang, sarana, dan peralatan kerja yang memadai. Tiga komponen kunci pada tingkat perkembangan memiliki skor komponen kunci terendah menunjukkan bahwa Pokmaswas bidang perikanan perlu mendapat ruang, sarana, dan peralatan kerja yang memadai guna menunjang tugas pengawasan sumber daya perikanan di Negeri Hukurila.

Tabel 10. Penilaian Sarana dan Prasarana

Karakteristik Organisasi	Komponen Kunci	Penilaian		
		Kepentingan/ Prioritas (Bobot)	Tingkat Perkembangan	Skor
Fasilitas atau alat penunjang kerja	a. Ruang kerja	3	0,25	0,75
	b. Sarana kerja	3	0,25	0,75
	c. Peralatan kerja	3	0,25	0,75

Sumber: data primer (2024).

Tingkat Perkembangan Pokmaswas

Nilai kerangka pengembangan kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila yang telah terurai di atas digunakan untuk analisis tingkat perkembangan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila melalui nilai indeks *institutional development framework* (IDF). Tabel 11

menunjukkan bahwa nilai indeks IDF adalah 1,44 (dibulatkan menjadi 1), nilai ini menunjukkan bahwa Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila tidak memiliki sumber daya kelembagaan yang cukup untuk menjamin kelangsungannya, Pokmaswas perlu mempertimbangkan kembali tujuan keberadaannya.

Tabel 11. Analisis Indeks IDF

Jumlah Skor (Z)	Jumlah Bobot (X)	Indeks IDF (I = Z/X)	Arti Indeks IDF
181,00	126,00	1,44	Nilai I atau IDF sebesar 1,44 (pembulatan menjadi 1,0) atau kurang, menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki sumber daya kelembagaan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Lembaga seperti ini perlu mempertimbangkan kembali tujuan keberadaannya.

Sumber: data primer (2024).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan indeks IDF pada bidang perikanan, misalnya penelitian oleh Yulianto *et*

al., (2011) yang menempatkan Dinas Perikanan dan Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kebersihan



dan Pertamanan dalam tahap pemantapan dalam melakukan pengelolaan perikanan udang, kemudian Rusmilyansari *et al.*, (2014) menyimpulkan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah mendekati tahap pemantapan atau memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan pendekatan pengelolaan konflik dalam pengelolaan sumber daya perairan teritorial. Terlihat bahwa perbedaan bentuk kelembagaan sangat membedakan tingkat perkembangan lembaga tersebut, pada dua contoh penelitian ini bentuk kelembagaannya adalah dinas, badan, dan pemerintah daerah, sedangkan bentuk lembaga Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila hanyalah kelompok masyarakat pengawas yang dibentuk oleh dinas (SK DKP Provinsi Maluku). Contoh penelitian dengan bentuk kelembagaan berupa kelompok masyarakat yang mirip dengan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila adalah penelitian Abrahamsz *et al.*, (2018), penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kelembagaan pengelola perikanan kepiting bakau di *Ohoi* Evu (kelompok masyarakat bernama Kelompok Sinar Abadi) tergolong dalam kategori sedang, upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola difokuskan pada penetapan rencana pengelolaan perikanan kepiting. Di sisi lain, kepatuhan, kelengkapan aturanmain dan mekanisme pengambilan keputusan masih harus dioptimalkan.

Peningkatan pengembangan kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila perlu dilakukan guna mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Secara umum upaya peningkatan pengembangan kelembagaan oleh Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila dan DKP Provinsi Maluku dapat mengadopsi 10 strategi pengembangan kapasitas kelembagaan Pokmaswas yang dikemukakan oleh Wiseli, (2020) mulai dari peningkatan kapasitas SDM anggota Pokmaswas dengan pembekalan dasar-dasar pengawasan, pelibatan Pokmaswas secara berkala dalam pengawasan terpadu, membentuk kerjasama Pokmaswas dengan lintas sectoral dan kelompok masyarakat lainnya, melakukan pertemuan kelompok secara regular sebagai ajang evaluasi dan

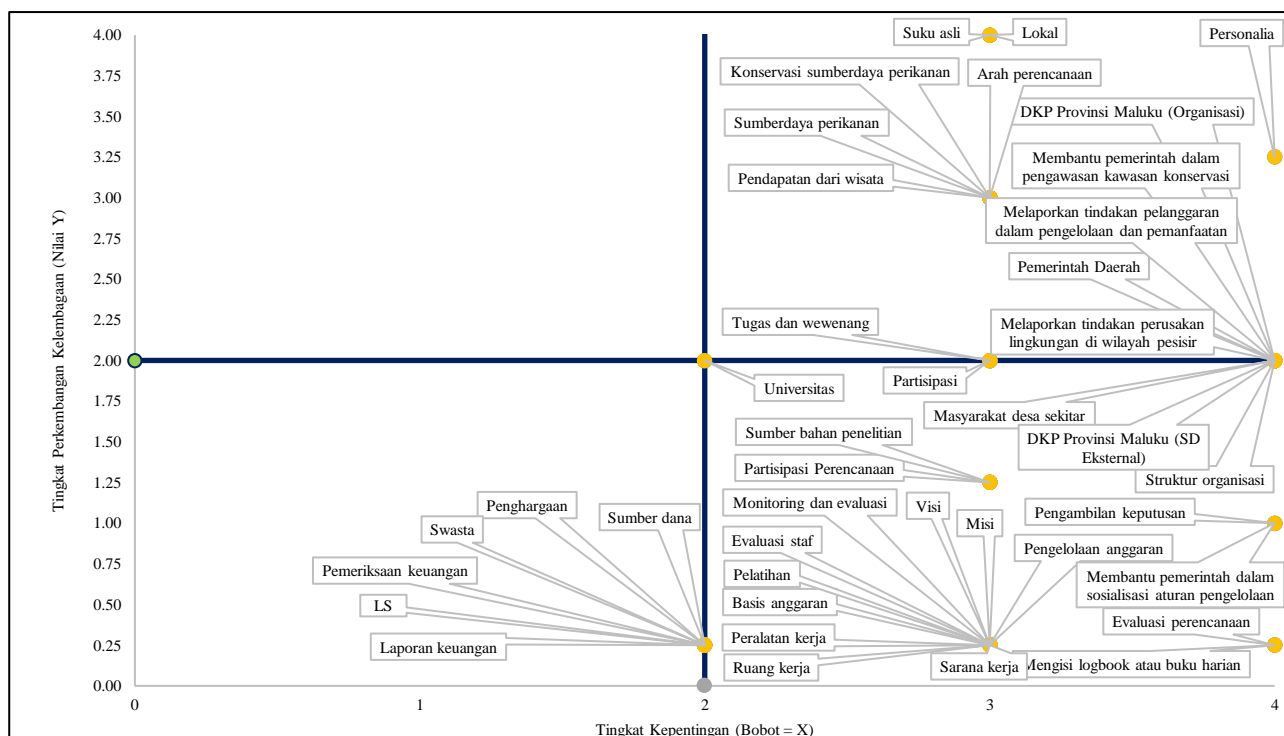
pengembangan, penetapan aturan lokal yang diinisiasi oleh Pokmaswas, melaporkan adanya pelanggaran secara tepat dan cepat agar dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, pembuatan dokumen AD/RT kelompok, menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta (perusahaan sektor perikanan) agar dapat menjadi sponsor kegiatan Pokmaswas baik dalam pembiayaan dan dukungan sarana dan prasarana, dukungan pemerintah dalam mendukung keberadaan Pokmaswas, hingga perlu adanya kemandirian Pokmaswas dalam pelaksanaan tugas.

Prioritas Pengembangan Kelembagaan Pokmaswas

Pengembangan kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila oleh Pokmaswas tersebut atupun dibantu oleh DKP Provinsi Maluku harus memiliki prioritas (sesuatu yang didahulukan dan diutamakan). Ratnawati, (2010) mengungkapkan bahwa prioritas yang perlu di benahi dalam pengembangan kapasitas institusional Pokmaswas adalah pendidikan dengan persentase, pembiayaan kelembagaan serta penyediaan sarana dan prasarana, dukungan kebijakan pemerintah, dan pembagian tugas. Untuk merumuskan prioritas pengembangan kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila dilakukan analisis dalam bentuk grafik sasaran prioritas (Manullang, 1999).

Nilai kepentingan atau prioritas (bobot atau X) dan nilai tingkat perkembangan kelembagaan (Y) pada empat puluh (40) komponen kunci kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila dianalisis dalam grafik hingga muncul pola penyebaran titik-titik komponen kunci pada empat (4) kuadran terlihat pada Gambar 1. Manullang (1999) mengartikan pola penyebaran titik-titik komponen kunci pada keempat kuadran sebagai kinerja dalam arti berapa jauh lembaga tersebut telah mencapai apa yang ingin dicapainya. Grafik tersebut disebut juga sebagai gambaran dari profil kelembagaan, yang dipakai untuk membandingkan perkembangan sebuah lembaga dari waktu ke waktu, atau antara satu lembaga dengan lembaga lain yang sejenis.





Gambar 1. Grafik Sasaran Prioritas Pengembangan Kelembagaan Pokmaswas Bidang Perikanan di Negeri Hukurila

Grafik sasaran prioritas pengembangan kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila pada Gambar 1 menunjukkan bahwa hanya 7 atau 17,5% komponen kunci berada pada tingkat perkembangan tinggi, dan 33 atau 82,5% komponen kunci berada pada tingkat perkembangan rendah, atau sebagian besar komponen kunci kelembagaan yang menguraikan karakteristik organisasi dan sumber daya kelembagaan berada pada prioritas atau kepentingan tinggi namun memiliki kinerja yang rendah.

Terdapat 25 sasaran pengembangan kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila. Sasaran tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga skala prioritas, yakni:

1. Skala prioritas jangka pendek adalah peningkatan peran, yakni tugas pengawasan sumber daya perikanan di Negeri Hukurila oleh Pokmaswas. Hal ini merupakan peran utama atau tugas pokok dan fungsi Pokmaswas yang dinilai belum maksimal dijalankan sesuai aturan alur pengawasan.
2. Skala prioritas jangka menengah adalah pengembangan organisasi, peningkatan kepemimpinan, peningkatan sistem

manajemen, membangun hubungan/komunikasi/dan koordinasi, pengelolaan anggaran dan pengadaan fasilitas dan alat penunjang kerja.

3. Skala prioritas jangka panjang adalah, peningkatan keterampilan dan pengembangan anggota, serta pengembangan produk atau nilai ekonomi sumber daya perikanan di Negeri Hukurila.

Implementasi prioritas pengembangan kelembagaan dalam kebijakan dan program kegiatan kerja Pokmaswas dan DKP Provinsi Maluku perlu dilakukan untuk meningkatkan status kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila dan mencapai tujuan atau arah sistem pengawasan berbasis masyarakat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.58/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yakni sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara

berkelanjutan. Pemanfaatan berkelanjutan dimaksud adalah pemanfaatan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang, dengan tetap memperhatikan keseimbangan fungsi lingkungan hidup. Selain itu menurut Cinner *et al.*, (2012) dalam Abrahamsz *et al.*, (2018) pengelolaan kelembagaan pengelola berimplikasi penting karena pengelolaan perikanan bisa sukses terganrung pemahaman kondisi sosial dan kelembagaan yang kuat dalam meningkatkan kepatuhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Status kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila adalah rendah atau tidak memiliki sumber daya kelembagaan yang cukup untuk menjamin kelangsungannya. Prioritas pengembangan kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila terbagi atas:

1. Skala prioritas jangka pendek adalah peningkatan peran, yakni tugas pengawasan sumber daya perikanan di Negeri Hukurila oleh Pokmaswas. Hal ini merupakan peran utama atau tugas pokok dan fungsi Pokmaswas yang dinilai belum maksimal dijalankan sesuai aturan alur pengawasan.
2. Skala prioritas jangka menengah adalah pengembangan organisasi, peningkatan kepemimpinan, peningkatan sistem manajemen, membangun hubungan/komunikasi/dan koordinasi, pengelolaan anggaran, serta pengadaan fasilitas dan alat penunjang kerja.
3. Skala prioritas jangka panjang adalah, peningkatan keterampilan dan pengembangan anggota, serta pengembangan produk atau nilai ekonomi sumber daya perikanan di Negeri Hukurila.

Saran

Kelembagaan Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila harus dikembangkan dengan bantuan dan pendampingan yang kontinu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku maupun Pemerintah Negeri Hukurila

(pemerintah desa) sesuai tiga (3) skala prioritas yang disimpulkan. Penelitian selanjutnya untuk memperkuat penelitian ini adalah kajian mendalam tentang evaluasi pelaksanaan tugas fungsi pokok Pokmaswas bidang perikanan di Negeri Hukurila.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak D. Maitimu selaku Ketua Pokmaswas Tuhulesy Negeri Hukurila.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamsz, J., Makailipessy, M. M., & Thenu, I. M. (2018). Dinamika Kelembagaan dan Implikasinya Dalam Pengelolaan Perikanan Kepiting Bakau di Ohoi Evu Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 10(1), 53–61. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi>
- Ariansyah, S. (2021). *Kaum Muda Jaga Laut Maluku*. Econusa. <https://econusa.id/id/>
- DKP Provinsi Maluku. (2021). Laporan Kinerja instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 2021. In *Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku* (pp. 1–35). <https://malukuprov.go.id/storage/2022/06/lkip2021/28.%20LKIP%20Dinas%20Kelautan%20dan%20Perikanan%20Tahun%202021.pdf>
- Manullang, S. (1999). *Panduan Pelaksanaan Lokakarya IDF (Institutional Development Framework) Untuk Taman Nasional di Indonesia: Vol. I*. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacm592.pdf
- Nuari, F. R., Diamantina, A., & Soemarni, A. (2022). Implementasi Tugas Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Terhadap Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Dilakukan Oleh Nelayan Kecil di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 11(2), 1–12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Pemerintah Negeri Hukurila. (2024). *Beranda Website Negeri Hukurila*. <https://hukurila.id>



- Ratnawati. (2010). Studi Pengembangan kapasitas Instiusional Pokmaswas Dalam Pengelolaan Sumberdaya terumbu Karang di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Spasial*, 8(1), 52–59.
<https://www.researchgate.net/publication/331715676>
- Rusmilyansari, Rosadi, E., & Apriansyah. (2014). Kapasitas dan Strategi Kelembagaan Pemerintahan Dalam Pengelolaan Konflik Antar Pengguna Sumberdaya Perairan Kabupaten tanah Laut. *Marine Fisheries*, 5(1), 41–48.
- Sahetapy, D., Selanno, D., & Tuhumury, N. (2019). Potensi Ikan Karang di Perairan Pesisir Negeri Hukurila Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 15(2), 46–57.
<https://doi.org/10.30598/tritonvol15issue2>
page46-57
- Sahetapy, D., Siahainenia, L., Selanno, D. A. J., Tetelepta, J. M. S., & Tuhumury, N. C. (2021). Status Terumbu Karang di Perairan Negeri Hukurila. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 17(1), 35–45.
<https://doi.org/10.30598/tritonvol17issue1>
page35-45
- Sugiyono. (2017). *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- USAID. (2020). *Buku Saku Pokmaswas: Vol. I*.
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XBW6.pdf
- Wiseli, R. (2020). Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pokmaswas di Provinsi Bangka Belitung. *Akuatik Jurnal Sumberdaya Perairan*, 14(2), 1–8.
- Yulianto, I., Wiryawan, B., & Taurusman, A. A. (2011). Strategi dan Rekomendasi Pengelolaan Perikanan Karang Berdasarkan Status Kelembagaan. *Marine Fisheries*, 2(2), 121–127.

